

## Hasil Debat Perdana Pemilihan Presiden 2019 dengan Kisi-Kisi Tidak Sesuai Ekspektasi Publik

### Pendahuluan

Saat debat perdana Pilpres 2019, Kamis 17 Januari 2019, kedua pasang capres dan cawapres sama-sama mengemukakan kebijakan yang akan diambil dalam menangani sederet permasalahan. Diantaranya adalah masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Jalannya debat yang dibawakan oleh kedua paslon kemarin terkesan tidak sesuai konteks bahasan debat dan sangat jauh dari ekspektasi orang banyak, meskipun telah diberikannya kisi-kisi pertanyaan panelis. Maka untuk memahami sepenuhnya debat pertama tersebut, tim Kastrad BEM Kemafar Unpad mengkaji lebih dalam bagaimana jalannya dan hasil dari debat pertama pemilihan presiden kemarin.

### Hukum

Salah satu masalah yang diangkat dalam debat perdana ini adalah permasalahan hukum. Permasalahan pertama terkait hukum adalah peraturan daerah yang tumpang tindih dan tidak harmonis.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, berencana untuk menggabungkan semua fungsi legislasi yang ada di pemerintahan menjadi pusat legislasi nasional yang akan dikontrol langsung oleh presiden sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta menyederhanakan regulasi hukum.

Sedang, menurut paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan dengan bantuan dari para pakar hukum nasional, para ahli yang berasal dari universitas serta bantuan dari publik dan dipimpin oleh Presiden serta Wakil Presiden untuk menyelaraskan hukum yang terdapat di pusat dan daerah sehingga terbentuklah kepastian hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Saat menanggapi tanggapan Jokowi saat debat berlangsung Prabowo mengatakan bahwa presiden merupakan *chief of law enforcement* yang penanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum.

Sebagai kepala negara, sejatinya seorang presiden tentu memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk itu, presiden memerlukan bantuan dari menteri serta jajaran pemerintahan lainnya agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun gagasan penyederhanaan hukum sepintas terlihat sebagai solusi yang baik, namun ternyata pelaksanaan hukum tidak sesederhana yang dipikirkan. Diperlukan pakar-pakar hukum yang telah teruji dalam bidangnya untuk mengkaji hal yang sebenarnya menyebabkan ketidakselarasan hukum, serta diperlukan juga peran masyarakat sebagai pengamat agar dapat menyelaraskan hukum dan membuat hukum yang adil.

Menanggapi ucapan Prabowo mengenai presiden merupakan *chief of law enforcement*, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Bayu, mengatakan bahwa menurut pasal 24 (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijamin sebagai kekuasaan merdeka dan harus bebas dari campur tangan manapun termasuk presiden. Oleh karena itu, presiden tidak boleh mencampuri kekuasaan yudikatif. Sedangkan, untuk instansi Polri dan Kejaksaan, berdasarkan perundang-undangan telah menjamin lembaga tersebut dalam menjalankan tugas tetap harus bebas dari campur tangan presiden. Menurut pengamat hukum, Suhadi, Indonesia menganut *trias politica*, sehingga wacana presiden sebagai *chief of law enforcement* tidak bisa dilaksanakan di Indonesia.

Permasalahan debat selanjutnya adalah di masyarakat sering dipertentangkan kuasa hukum dengan isu HAM sehingga pada konteks seperti apa seharusnya hukum ditegakan dan HAM diperhatikan.

Paslon nomor urut 01 berpendapat untuk tidak mempertentangkan HAM dengan penindakan hukum yang sesuai prosedur. Jokowi mengatakan bahwa penahanan terhadap tersangka memang merampas kemerdekaannya, tetapi penegakan hukum bertujuan melindungi masyarakat. Sebagai contoh adalah penangkapan tersangka korupsi yang merupakan prosedur hukum yang harus dilakukan. Jika dalam penindakan hukum terhadap tersangka korupsi ini tidak sesuai prosedur, dapat dilakukan pra-peradilan

Paslon nomor urut 02 mengatakan aparat penegak hukum cenderung berat sebelah, sebagai contoh kasus kepala desa di Jawa Timur ditangkap setelah dirinya menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM menurut paslon nomor urut 02.

Pengambilan contoh kasus hukum yang diambil Jokowi juga dirasa kurang tepat karena biasanya masyarakat mempertentangkan hukum yang tajam kebawah, tumpul keatas. Sedangkan tanggapan Prabowo untuk pernyataan Jokowi juga tidak menjawab karena beliau hanya mempertanyakan kondisi hukum isu HAM pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Kasus yang sekiranya bisa untuk didiskusikan oleh kedua pasang calon capres-cawapres adalah kasus Oppo Lindu (92) yang divonis 1 bulan 14 hari karena menebang pohon sebesar 5 inci atau kasus Nenek Minah yang divonis 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan tanpa tahanan karena didakwa mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan 2009 lalu. Atau kasus yang baru-baru ini marak tentang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan **alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan** dimana bukan termasuk grasi maupun pembebasan bersyarat, sehingga pembebasan ini tidak memiliki landasan hukum.

## **HAM**

Dalam debat capres perdana ini, kedua pasang capres-cawapres memaparkan visi misi yang berkaitan dengan kebijakan mereka untuk mengatasi pelanggaran HAM. Paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 memaparkan :

## 1. Paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf

- Visi misi mereka adalah Indonesia maju. Mereka menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Mereka yakin semakin maju sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM semakin baik.
- Bukan hanya hak sipil politik tapi pemenuhan hak ekonomi dan budaya menjadi pilihan dalam memajukan Indonesia. Akses pendidikan, pelayanan kesehatan, permodalan, dan hak pembangunan merupakan cara pemenuhan HAM yang mendasar.
- Bukan hanya hak sipil politik tapi pemenuhan hak ekonomi dan budaya menjadi pilihan kami memajukan Indonesia. Akses pendidikan, pelayanan kesehatan, permodalan, dan hak pembangunan merupakan cara pemenuhan HAM yang mendasar.

## 2. Paslon urut 02, Prabowo-Sandi

- Dalam masalah hukum, HAM, Korupsi dan terorisme, mereka ingin menyelesaikan dari muara permasalahan. Aparat adalah tanggung jawab Kepala Eksekutif, sehingga jika terdapat pejabat yang menyimpang ia akan dipecat. Hukum akan ditegakkan untuk rakyat kecil, sehingga menghadirkan kesejahteraan. Hukum akan dipastikan tegak lurus dan Supremasi HAM hadir, harga mati.

Ditinjau dari visi misi kedua paslon, masih belum terlihat langkah konkret yang akan mereka lakukan terhadap pelanggaran HAM. Mereka hanya memaparkan pernyataan secara umum saja. Akan seperti apakah langkah konkret dari kedua paslon tersebut terhadap pelanggaran HAM? Kemudian dilihat dari sisi jawaban dan tanggapan kedua paslon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh panelis dan masing-masing paslon, bisa dibilang tidak menyentuh substansi yang diharapkan oleh publik, yaitu tidak dibahasnya isu HAM besar dan aktual seperti kasus HAM berat pada rentang 1996-1998 lalu ataupun kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Berkaitan dengan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, paslon nomor urut 01 mempertanyakan adanya kontra situasi dalam struktur kepengurusan partai yang dipimpin Prabowo dengan visi-misi paslon nomor urut 02 yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender, pemberdayaan perempuan, dan memprioritaskan pemberdayaan perempuan, yang mana jabatan strategis partai umumnya dipimpin oleh laki-laki. Namun, nampaknya pertanyaan yang dilontarkan paslon nomor urut 01 ini menyalahi aturan debat nomor 4 karena mengarah ke serangan personal, bukan mengarah pada penciptaan solusi atas masalah. Sekiranya pada debat selanjutnya, pihak penyelenggara terlebih dahulu menetapkan batasan isi pertanyaan dan pernyataan agar tidak kembali muncul pertanyaan maupun pernyataan yang sifatnya menyerang personal lawan.

Terkait isu disabilitas, Sandi selaku cawapres nomor urut 02 melontarkan pertanyaan mengenai program yang akan dilakukan paslon nomor urut 01 mengenai diskriminasi dan program yang pasti pemenuhan hak penyandang disabilitas didasari kisah Zulfan, seorang Difabel Mentor Bisnis yang ditemui sewaktu safari kampanye. Kemudian, Jokowi selaku capres nomor urut 01 menyebutkan bahwa kesetaraan dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, Jokowi selaku

capres nomor urut 01 masih belum menyebutkan program pasti yang akan dilakukan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Sandi.

Mengenai diskriminasi penyandang disabilitas, kedua paslon sama-sama menyatakan bahwa sudah tidak ada diskriminasi dengan adanya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, tetapi dalam realita masih banyak sekali diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas. Untuk menjawab hal ini, kedua paslon hanya menyampaikan argumen yang menjanjikan pemenuhan hak mereka tanpa disertai program yang akan mereka laksanakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua paslon masih belum bisa memberikan solusi atas permasalahan ini.

## **Korupsi**

Pada bidang korupsi, kedua paslon sama-sama menawarkan kebijakan yang akan dibawa untuk memerangi korupsi apabila terpilih sebagai presiden nantinya. Paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, menawarkan beberapa kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya semua jenis rekrutmen akan didasarkan pada kompetensi bukan finansial maupun nepotisme, juga melakukan perampingan birokrasi dan pengawasan internal serta eksternal.

Kebijakan yang ditawarkan ini didasarkan pada salah satu penyebab korupsi, yaitu tingginya biaya politik di Indonesia. Tren politik berbiaya tinggi masih menjadi biang penyebab banyaknya mereka yang berkontestasi di pemilu meringkuk dalam jeruji besi. Banyak kepala daerah terpilih yang berakhir menjadi pesakitan lantaran mereka menempuh segala cara untuk memenangkan pemilu.

Contoh terbaru adalah kasus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatra Utara. Ramadhan Pohan dituding melakukan penipuan dan penggelapan dana sekitar Rp15 miliar. Uang sebanyak itu ia pinjam dari pihak pengadu untuk kepentingan kampanye saat ia bersaing di Pilkada Kota Medan, Sumatra Utara, tahun lalu. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, tak hanya gagal menjadi Wali Kota Medan, Pohan kini berlabel tersangka bahkan bukan tak mungkin menjadi terpidana.

Mereka sampai-sampai menutup kesadaran atas kemampuan sendiri, lalu nekat berhutang sana-sini untuk menutupi biaya kontestasi yang amat tinggi. Dengan perilaku seperti itu, mereka yang menang ataupun yang kalah dalam pilkada sama-sama harus menanggung beban. Pemenang tak akan fokus pada upaya kesejahteraan rakyat saat menjabat, tapi sibuk pada usaha pengembalian modal. Korupsi jamak dilakukan untuk mengisi kembali pundi-pundi kekayaan yang dikuras atau untuk membayar pinjaman selama pilkada. Politik balas budi juga menjadi hal lumrah kepada mereka yang membantu memenangi pilkada. Yang kalah harus siap jatuh miskin atau berurusan dengan hukum karena persoalan utang seperti halnya Pohan.

Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperlukan modal 20 hingga 30 miliar untuk mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati. Sedangkan, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, diperlukan modal sekitar 20 hingga 100 miliar.

Lalu bagaimanakah cara mengatasi politik berbiaya tinggi ini?

Pada umumnya, korupsi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal meliputi sifat tamak dan moral yang kurang kuat dan faktor eksternal meliputi adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan hukum.

Solusi yang ditawarkan paslon nomor urut 01, Jokowi dapat dikatakan masuk akal berdasarkan faktor penyebab korupsi diatas. Namun, kenyataannya politik di Indonesia memang memerlukan biaya yang besar terutama untuk kampanye. Sehingga sulit rasanya menjalankan hal yang ditawarkan oleh Jokowi. Sebaiknya untuk mengatasi mahalannya ongkos penyelenggaraan pemilu adalah dengan secepatnya memperbaiki kualitas aturan yang mengatur proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu sendiri. Dalam pemilu tidak hanya membutuhkan calon yang baik tetapi dibutuhkan juga modal untuk kampanye dan pengadaan saksi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pengadaan kampanye yang murah serta melakukan pengawasan yang baik sehingga perarturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar oleh peserta pemilu.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus pada pembuatan maupun perbaikan aturan yang bisa menekan maraknya politik berbiaya tinggi, jual beli "*perahu politik*" dan suara pemilih, serta penegakan hukum dan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi. Aturan dana kampanye pilkada yang saat ini ada juga sangat tidak bergigi dalam menjerat penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Sedangkan, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, akan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi hal ini, yaitu melipatgandakan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertanyaannya adalah apakah dengan melipatgandakan gaji ASN akan berpengaruh dengan menurunnya tindak pidana korupsi? Pada awalnya, orang memang masih yakin bahwa kenaikan gaji, akan menurunkan korupsi. Hal ini didasarkan pada penelitian terkenal yang pernah dilakukan oleh Van Rijckeghem dan Weder di tahun 2001. Hasilnya? Negara dengan gaji tinggi pada aparatnya, angka korupsinya ternyata lebih rendah. Namun, riset ini belakangan dikritik habis-habisan. Salah satu penyebabnya karena angka gaji yang mereka gunakan dalam riset ternyata dirata-rata dengan cara membagi jumlah uang yang pemerintah keluarkan dengan jumlah karyawannya sehingga data ini dianggap bias.

Oleh karena biasanya data, Jakob de Haan, Erik Dietzenbacher, Vn H Le di tahun 2013 melakukan penelitian dengan data yang lebih akurat dengan hasil akhirnya, pengaruh kenaikan gaji terhadap menurunnya korupsi hanya sekitar 0,35 (dari skala 0 hingga 6). Jadi, betapa nyaris tidak ada pengaruhnya. Bahkan, menurut penelitian ini, menambah gaji justru menjadi upaya yang terlalu mahal untuk mengurangi korupsi. Dengan kata lain menurut mereka, hasilnya tidak sepadan!

Sebagai contoh kasus yang menjerat Ketua MK, Akil Mochtar. Saat ini, Ketua MK mendapatkan gaji Rp121 juta dilengkapi fasilitas protokoler, dari rumah dinas, ajudan hingga fasilitas kendaraan premium. Namun, Akil tetap korupsi dan akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Kini Akil meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Mengapa hal ini masih terjadi? Jawabannya satu, masalah korupsi mungkin bukan lagi soal jumlah gaji, tapi pada masalah karakter pribadi. Dengan kata lain, kalau mental sudah korup, mau berapapun gajinya akan dirasa tidak pernah cukup! Gaji memang harusnya cukup dan memenuhi standar yang wajar tetapi, tidak perlu berlebihan apalagi sampai berkali lipat.

Dari analisis jawaban capres diatas, Pasangan Jokowi–Ma'ruf Amin lebih menekankan kepada perubahan sistem dan tindakan pencegahan perilaku korupsi. Sementara pendekatan tindakan pencegahan Prabowo lebih bersifat subjektif perorangan, bukan dengan perubahan sistem yaitu dengan melipatgandakan gaji ASN.

## **Terorisme**

Kemudian, dalam bahasan terorisme dibagi menjadi dua diskursus dalam debat capres ini: (1) Bagaimana mengatasi konflik pemberantasan terorisme yang bertentangan dengan konsep HAM; (2) Bagaimana langkah masing-masing paslon dalam program deradikalisasi yang tidak hanya menyoar pelaku, tetapi juga lingkungan.

Dalam diskursus pertama, melalui Ma'ruf Amin selaku cawapres paslon nomor urut 01 lebih mendominasi. Ma'ruf Amin menjelaskan berdasarkan latar belakangnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif bahwa terorisme bukanlah jihad dan haram dilakukan sesuai fatwa yang dikeluarkan MUI. Pada penanganannya nanti, paslon nomor urut 01 akan mensinergiskan upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan akan dilakukan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham radikal dan intoleran. Serta deradikalisasi sebagai upaya mengembalikan yang telah terpapar. Upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi dijalankan berdasarkan latar belakang hal yang memicu oknum yang melakukan tindakan terorisme. Kedua upaya ini akan dilakukan menggunakan pendekatan yang humanis, manusiawi dan tidak melanggar HAM serta mengikutsertakan ormas keagamaan.

Jokowi selaku capres paslon nomor urut 01 menambahkan bahwa pendekatan juga dilakukan melalui penegakkan hukum dan pendekatan persuasif melalui pembinaan agama, ekonomi dan sosial pun SOP harus berbasis HAM dan UU terorisme disertai transparansi saat penindakan. Sejatinya upaya ini dapat diterapkan mengingat Jokowi telah melaksanakan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi melalui BNPT. Namun, yang menjadi catatan adalah pihak paslon nomor urut 01 harus mengkaji ulang isi dan targetnya karena menurut salah satu eks nabi terorisme, Yudi Zulfachri, program ini masih dirasa belum menyentuh "*ideologi sesat*" yang diyakini dan baru sebatas mengubah perilaku radikal saja, serta target program kontraradikalisasi, yang dilaksanakan melalui seminar-seminar oleh BNPT, dirasa masih salah sasaran menurut salah

satu Pengamat Pertahanan, Susaningtyas Kertopati. Selain itu, pihak paslon nomor urut 01 seharusnya juga memaparkan langkah konkret penegakan HAM dalam program ini.

Sedang, paslon nomor urut 02 melalui Prabowo Subianto selaku capres menjelaskan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan kiriman dari luar Indonesia kemudian menyamar dan mendiskreditkan salah satu golongan di Indonesia, *dalam pernyataan ini adalah Islam*, sehingga timbul stigma negatif terhadap golongan tersebut. Pernyataan ini berdasarkan pengalamannya sebagai pendiri Satuan 81 Penanggulangan Teror (Sat-81 Gultor) bersama Luhut Binsar Pendjaitan sebagai komandan. Pernyataan dari Prabowo Subianto ini diperkuat juga dengan kajian Gerard Chalian dan Arnaun Blind dalam *The History of Terrorisme: from Antiquity to Al Qaeda* (2007) bahwa terorisme yang menggunakan justifikasi terhadap Islam telah muncul sekitar 1968 dan kian parah sejak Peristiwa 9/11. Prabowo Subianto pun ikut mendukung program deradikalisasi yang berbasis HAM untuk ditegakkan dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal yang sekiranya menjadi catatan adalah bukti-bukti yang bisa menguatkan pernyataan Prabowo Subianto bahwa terorisme yang ada di Indonesia merupakan kiriman dari luar Indonesia.

Dalam diskursus kedua, mengenai langkah masing-masing paslon dalam program deradikalisasi yang tidak hanya menasar pelaku, tetapi juga lingkungan. Paslon nomor urut 02 mempertahankan pernyataan sebelumnya bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk penyusupan dari luar negeri diperparah dengan adanya kesenjangan ekonomi, rasa ketidakadilan dan rasa keputusasaan sehingga mudah untuk dipengaruhi pengajaran paham radikal yang mengarah pada kekerasan. Pada pelaksanaannya nanti, paslon nomor urut 02 ini akan berfokus pada peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui investasi besar-besaran pada pendidikan (lembaga pendidikan serta tenaga pendidik), kesehatan, bidang kepolisian, intelejen, angkatan bersenjata dan ekonomi serta masyarakat kurang mampu, agar tercipta suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci dan tidak merasa tersakiti. Upaya ini juga didukung oleh penguatan dalam pihak-pihak yang tergabung dalam anggota pemberantasan terorisme serta fasilitas-fasilitas pendukung. Selanjutnya, melalui program kontraideologi, kontranarasi dan kontrapropaganda pada masyarakat luas yang dilengkapi dengan peta persebaran masyarakat (yang beresiko terpapar ideologi sesat), paslon nomor urut 02 akan hadir untuk memastikan tidak adanya masyarakat yang terjerumus ke dalam terorisme. Pernyataan ini sekiranya diberikan penjelasan apakah paslon nomor urut 02 ini akan bekerjasama dengan ormas yang ada mengingat masyarakat cenderung lebih percaya kepada para pemuka agama dibandingkan dengan pemerintah.

Sedang, paslon nomor urut 01 menjelaskan bahwa melalui program deradikalisasi, mereka yang sudah terpapar akan dikembalikan ke jalan yang benar dengan sebelumnya dicari tahu penyebab penyimpangan perilaku mereka. Setelah diketahui penyebabnya, program deradikalisasi akan dilaksanakan sesuai pendekatan berbeda. Pada pernyataan paslon nomor urut 01 ini, sekiranya perlu diberikan kejelasan mengenai program mana yang akan dilakukan, apakah seperti yang sebelumnya (program deradikalisasi oleh BNPT) atau melalui program baru yang disinergikan dengan program-program lainnya.

Dalam hal penanganan terorisme ini, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi lebih unggul karena solusi yang diberikan didasarkan pada pengalaman dalam pemberantasan terorisme, juga dalam kenyataannya bahwa pelaku cenderung kearah masyarakat yang tergolong kurang secara ekonomi maupun pendidikan sehingga mudah terpapar “*ideoogi sesat*”.

## **Kesimpulan**

Dari debat ini, ada beberapa hal yang *mungkin bisa* kita simpulkan dan kita pertimbangkan lagi mengenai keseriusan masing masing paslon dalam menanggapi permasalahan HAM di Indonesia ini, diantaranya adalah:

1. **Cara paslon memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh panelis.**

Kedua paslon dalam menanggapi pertanyaan yang dilontarkan masih sulit menjawab sesuai yang diinginkan, bahkan sampai akhir terdapat banyak bahasan yang tidak sesuai konteks pertanyaan. Dari cara kedua calon menangkap dan memberi tanggapan terhadap pertanyaan panelis, kita dapat memperkirakan bagaimana cara paslon mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi atau akan dihadapi Indonesia kedepannya.

2. **Permasalahan perbedaan pendapat antar paslon dijadikan masing masing paslon sebagai ajang saling serang.**

Dalam sebuah acara debat, perselisihan dan kecenderungan untuk saling serang memang sulit dihindari, namun salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah bagaimana serangan ini mengarah kepada sebuah argumentasi, bukan hanya bermain sentiment saja. Karena dari debat yang kita bisa lihat bagaimana kedua paslon cenderung menyerang secara personal tanpa menunjukkan maksud argumennya, juga dari hal tersebut kita dapat lihat bagaimana nanti cara mereka menanggapi permasalahan oposisi sedangkan hanya berupa serangan kecil dari masing masing paslon saja mereka tidak bisa mengendalikan diri? Bahkan dalam kondisi ekstremnya, kebebasan berpendapat pun bisa saja tercederai jika permasalahan perbedaan pendapat tidak dihadapi dengan bijak dan cenderung defensif tanpa pemberian solusi.

3. **Meskipun sudah diberikan “Kisi-Kisi Debat”, kedua paslon menjawab pertanyaan panelis dengan tidak teratur.**

Jika melihat ulang bagaimana jalannya debat kemarin, sebagai pengamat yang berada di posisi netral serta pernah melihat debat yang dilakukan mahasiswa, baik dalam debat Pemilihan Raya kampus ataupun lomba debat Bahasa Inggris atau debat Bahasa Indonesia (*British Parliamtentary Model* atau lainnya), tidak salah jika kita menilai debat kemarin sangat jauh dari kata debat yang baik. Pembagian tugas yang tidak rapih, bahkan terlihat kacau. Semoga saja, jika memang salah satu dari kedua paslon nanti terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mampu berpolitik dan membagi tugas serta kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan Indonesia dengna lebih baik.

Debat pertama capres kemarin menunjukkan kepada kita bahwa pemberian kisi-kisi tidak menjamin peningkatan performa, bahkan hasil dari debat tidak begitu menunjukkan kualitas sepenuhnya dari kedua paslon karena kecenderungan mereka dalam menjawab pertanyaan berdasarkan persiapan yang sudah dibuat oleh masing-masing tim pemenangnya. Bersyukurlah



kita karena KPU bersikap responsif terhadap hal ini, seperti yang dilansir oleh detiknew di beritanya yang bertajuk “KPU Tak akan Lagi Beri kisi-kisi Soal Debat Capres” pada tanggal 19 Januari lalu, KPU telah mengevaluasi debat pertama kemarin dan dengan mempertimbangkan berbagai factor serta aspirasi masyarakat, kisi-kisi debat tidak akan diberikan kembali dan penambahan waktu bagi para paslon dalam menyampaikan visi dan misi serta memberi tanggapan pertanyaan.

Maka sangat besar harapan akan debat yang lebih baik dapat dibawa oleh kedua paslon dalam debat kedua capres pada tanggal 17 Februari nanti, serta sangat dianjurkan bagi kita semua, sebagai pemilih cerdas, untuk tidak putus harapan hanya karena debat pertama tidak berjalan sesuai ekspektasi. Penggalan informasi oleh diri sendiri pun menjadi hal yang wajib dilakukan oleh kita semua, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan dalam debat-debat selanjutnya bahasan yang dibawa oleh kedua paslon tidak menunjukkan kondisi aktual negara ini dan juga kedua paslon itu sendiri.



## REFERENSI

### **Media Daring**

Andayani, Dwi. 2019. *Prabowo Cegah Teroris: Saya akan Tingkatkan Investasi di Intelijen-Polisi*. <https://news.detik.com/berita/4389580/prabowo-cegah-teroris-saya-akan-tingkatkan-investasi-di-intelijen-polisi> diakses pada 19 Januari 2019.

Akmala, Nisa. 2019. *5 Kasus Hukum Paling Menyayat Hati, Ada Nenek 92 Tahun Divonis Penjara*. <https://m.brilio.net/duh/5-kasus-hukum-paling-menyayat-hati-ada-nenek-92-tahun-divonis-penjara-1802028.html>. Diakses pada 21 Januari 2019

Belarminus, Robertus. *4 Hal yang Diupayakan KPK untuk Mencegah Korupsi*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17480601/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-mencegah-korupsi>. Diakses pada 21 Januari 2019

Bisnis News Writer. 2019. *Rangkuman Debat Capres 17 Januari 2019: Dari Sindiran Prabowo Soal Aparat, Serangan Balik Jokowi, Hingga Gengsi Tunjukkan Apresiasi*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190117/15/879361/rangkuman-debat-capres-17-januari-2019-dari-sindiran-prabowo-soal-aparat-serangan-balik-jokowi-hingga-gengsi-tunjukkan-apresiasi> diakses pada 19 Januari 2019.

Ferdinan. 2019. *KPU Tak akan Lagi Beri kisi-kisi Soal Debat Capres*. <https://news.detik.com/berita/4391621/kpu-tak-akan-lagi-beri-kisi-kisi-soal-debat-capres> diakses pada 21 Januari 2019.

Ghiffari, Renald. 2018. *Ini Kelemahan Program Deradikalisasi BNPT Menurut Eks Napi Terorisme*. <https://www.liputan6.com/news/read/3531373/ini-kelemahan-program-deradikalisasi-bnpt-menurut-eks-napi-terorisme> diakses pada 20 Januari 2019.

Huzaini, Pratama. 2019. *Analisa Debat I Pilpres, Dari Isu yang Diangkat Hingga Program Kerja*. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5c41b48f3de12/analisa-debat-i-pilpres--dari-isu-yang-diangkat-hingga-program-kerja>. Diakses pada 21 Januari 2019

Kenedy, Eddward S. 2019. *Debat Capres: Kok Bisa Prabowo Sebut Teroris Dikirim Negara Asing?*. <https://tirto.id/debat-capres-kok-bisa-prabowo-sebut-teroris-dikirim-negara-asing-deEH> diakses pada 20 Januari 2019.

Kresna, Mawa. 2019. *Debat Pilpres 2019: Debat Jaka Sembung Enggak Nyambung*. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/debat-pertama-pilpres-2019-debat-jaka-sembung-enggak-nyambung-deES>. Diakses pada 21 Januari 2019

- Lotulung, Garry. 2019. *Soal Usulan Prabowo Tentang Chief of Law Enforcement, Pengamat: Presiden Bukan Penegak Hukum Tertinggi*.  
<http://m.tribunnews.com/nasional/2019/01/20/soal-usulan-prabowo-tentang-chief-of-law-enforcemen-pengamatpresiden-bukan-penegak-hukum-tertinggi>. Diakses pada 22 Januari 2019
- Martin Anthony. 2018. *Bisakah Kenaikan Gaji Mengurangi Korupsi*.<https://www.kompasiana.com/anthonydiomartin/5aac9b6ecbe52343bb0618c4/bisakah-kenaikan-gaji-mengurangi-korupsi?page=all>. Diakses pada 21 Januari 2019
- Nathaniel, Felix. 2019. *Beda Cara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Tangani Terorisme*.  
<https://tirto.id/beda-cara-jokowi-ma039ruf-dan-prabowo-sandiaga-tangani-terorisme-deE9>  
diakses pada 20 Januari 2019.
- Saputra, Andi. 2019. *Konsep Chief Law Enforcement Officer Prabowo Dinilai Ancam Yudikatif*.<https://m.detik.com/news/berita/4392321/konsep-chief-law-enforcement-officer-prabowo-dinilai-ancam-yudikatif>. Diakses pada 21 Januari 2019
- Tim Editorial Tribun. 2018. *Pulang dari Jerman, Prabowo dan Luhut Panjaitan Bentuk Sat 81 Kopassus, Pasukan Anti Teror Mematikan*.  
<http://jambi.tribunnews.com/2018/11/22/pulang-dari-jerman-prabowo-dan-luhut-panjaitan-bentuk-sat-81-kopassus-pasukan-anti-teror-mematikan?page=3>. diakses pada 19 Januari 2019.